

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi yang terjadi antara aktor pelaksana program dengan masyarakat penerima program sudah berjalan dengan baik dan efektif. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Faskel di tingkat Kelurahan dengan peserta LKM, TIPP dan masyarakat. Sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan di awal pertemuan saja, tetapi sosialisasi tersebut dilaksanakan pada bulan Maret dan April sehingga masyarakat penerima program dapat memahami terkait penyampaian informasi yang diberikan oleh pendamping fasilitator dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Sukanandi.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Sukanandi dalam hal ini cukup dikatakan baik, karena dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Kemudian dilihat dari kualitas yang dimiliki oleh para pelaksana program KOTAKU juga sudah baik, dikarenakan mereka memiliki latar belakang pendidikan yang bagus. Pelaksana program KOTAKU telah memenuhi syarat dalam penetapan pendamping serta melaksanakan

pelatihan-pelatihan terlebih dahulu sebelum terjun langsung ke lapangan.

Sedangkan jika dilihat dari sisi sumber daya anggaran, dana yang diterima untuk pembangunan infrastruktur masih belum bisa menuntaskan semua permasalahan kumuh yang ada di Kelurahan Sukanandi.

3. Disposisi

Disposisi merupakan aspek penting dalam implementasi program. Disposisi merujuk pada karakter pelaksana program serta ketaatan akan implementor dalam menjalankan program. Aktor pelaksana dalam program KOTAKU di Kelurahan Sukanandi sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini dapat dilihat bahwa program KOTAKU di Kelurahan Sukanandi sudah terealisasikan dan dijalankan oleh pihak yang terkait dan berkomitmen untuk mengimplementasikan penyelenggaraan program KOTAKU sesuai dengan juknis. Namun terdapat hambatan lain, setelah pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilaksanakan masyarakat penerima manfaat terkadang tidak memelihara pembangunan tersebut dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Koordinasi antar pelaksana kegiatan program KOTAKU sudah menjalankan tugasnya dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kerjasama antar lembaga yang saling mendukung serta mampu menjalin hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan para pelaksana lainnya sehingga tidak terjadi ketimpangan. SOP dalam pelaksanaan program KOTAKU dapat dilihat dari Prosedur Operasional Standar (POS) untuk dijadikan acuan dan pedoman

pelaksanaan bagi para pelaksana. Aktor pelaksana program yang berasal dari tingkat kabupaten/kota mengetahui dengan adanya SOP sebagai petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan infrastruktur program KOTAKU. Sedangkan pada aktor pelaksana yang berasal dari tingkat masyarakat masih kurang mengetahui mengenai adanya petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program KOTAKU.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka untuk menindaklanjuti hasil penelitian, dirumuskan implikasi sebagai berikut :

1. Dilakukan pengawasan melalui Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman maupun dari Pendamping Fasilitator terhadap Kelompok Penerima Manfaat dan Pemelihara (KPP) agar kegiatan-kegiatan infrastruktur yang telah dilaksanakan bisa berfungsi secara berkelanjutan.
2. Perlu diadakan sosialisasi agar pelaksana program di tingkat masyarakat seperti KSM tidak bergantung kepada Pendamping Fasilitator mengenai pedoman pelaksanaan KOTAKU serta dapat mengetahui peran dan tupoksinya masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan KOTAKU.
3. Pemerintah perlu mengoptimalkan kegiatan pelaksanaan program KOTAKU yang bersifat pemanfaatan Bantuan Dana Investasi (BDI) agar mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan lokasi kumuh yang ada di Kelurahan Sukanandi.